

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi: Hukum



Diajukan oleh:

IMROTIN NURJANNAH

NPM: 1974201001357

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi: Hukum



Diajukan Oleh:

IMROTIN NURJANNAH
NPM: 1974201001357

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

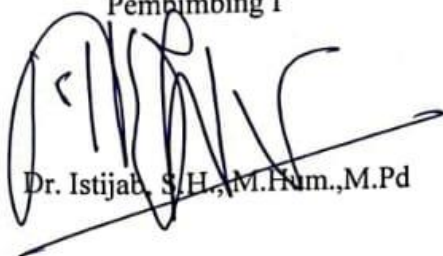
Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 25 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I


Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd

Pembimbing II


Humiati, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Imrotin Nurjannah
NPM : 1974201001357

Susunan Dewan Penguji :

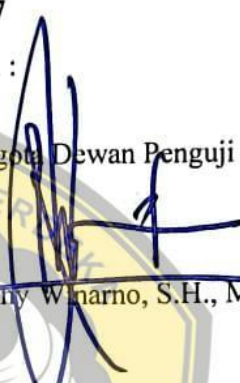
Ketua Penguji


Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd

Sekretaris Penguji


Humiati, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

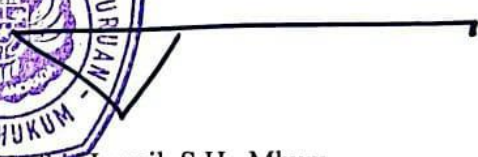
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 25 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan




Yudhia Ismail, S.H., Mhum

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Agustus 2023

Penulis



IMROTIN NURJANNAH
NPM.1974201001357

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap data pribadi pada administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan taslim atas junjungan nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan untuk menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak di dunia ini.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin lebih menambah wawasan dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat. Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, SH.Mhum, dan selaku Dosen Wali.
3. Bapak Dr. Istijab, S.H., MHum., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, serta memberikan kritik, saran serta bimbingan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Ibu Humiati, S.H., MHum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, serta memberikan kritik, saran serta bimbingan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji
6. Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmu serta membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayangnya dalam membesarkan serta membimbing penulis selama ini sehingga dapat terus berjuang dalam meraih impian serta cita-cita.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis semoga penulisan skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah ilmu khususnya dibidang ilmu hukum dan dapat dijadikan sumber bagi penelitian selanjutnya.

Pasuruan, 3 Juni 2023
Penulis

Imrotin Nurjannah
NPM.1974201001357



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Bentuk Perlindungan Hukum	12
3. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi	13
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	19
1. Pengertian Data Pribadi.....	19
2. Jenis-Jenis Data Pribadi.....	21
3. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi.....	23
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan	26
1. Pengertian Administrasi Kependudukan	26
2. Tujuan dan Hak Administrasi Kependudukan	27
3. Sistem Administrasi Kependudukan	28

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	30
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	30
2. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah.....	31
3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	39
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	43
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah	43
B. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan	55
BAB V : PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN	62

B. SARAN 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 : Perlindungan Hukum	49
2. Tabel 2 : Data Pribadi Yang Harus Dilindungi	57



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan salah satu kewajiban atau tanggung jawab negara termasuk perlindungan hukum atas data pribadi. Perlindungan hukum atas data pribadi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak seorang individu agar hak atas privasinya tidak dilanggar. Kependudukan adalah bagian dari kegiatan hukum administrasi negara, di mana secara hukum pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendataan terhadap setiap warga negara dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara.

Ketentuan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pendataan penduduk adalah upaya menciptakan hasil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berupa data administrasi pendataan kependudukan, dengan menggunakan sistem informasi kependudukan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi kependudukan. Selain itu, administrasi kependudukan dilakukan oleh semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan pembagian urusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data-data yang diperoleh diuraikan dengan metode kualitatif-deskriptif.

Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pada administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah, pada pelaksanaannya pemenuhan hak perlindungan data pribadi tersebut terdapat beberapa persoalan yang hingga kini masih sering terjadi dan sebagian belum teratasi. Oleh karenanya hukum harus menempatkan individu sebagai pusat perlindungan, yang berarti memastikan bahwa data pribadi dilindungi, terlepas dari apakah data mereka diproses di dalam atau di luar wilayah dimana mereka berada (*extra territorial scope*). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan otonom, pemerintah daerah perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan sumber pembiayaan, dengan menggali dan memberdayakan berbagai potensi daerah yang ada demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah